

DISERTASI

PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN PADA PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2022**

**PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM RANGKA
PEMBAHARUAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Misnar Syam, 1831203015, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Halaman 464, 2022)**

ABSTRAK

Beban pembuktian yang diberlakukan dalam penyelesaian sengketa konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 28 adalah pembalikan beban pembuktian. Tujuan dari pemberlakuan pembalikan beban pembuktian ini adalah memberikan perlindungan kepada konsumen, sehingga ketika dirugikan oleh pelaku usaha konsumen akan mendapatkan haknya kembali. Pembalikan beban pembuktian ini terbatas, di mana pelaku usaha hanya membuktikan unsur kesalahan saja, sementara unsur lain dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tetap harus dibuktikan oleh pelaku usaha. Hal ini menyulitkan konsumen untuk membuktikannya, sehingga tujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen tidak tercapai. Selain dari itu penyelesaian sengketa yang merupakan termasuk sengketa perdata, hukum acara yang digunakan di Pengadilan adalah *Herziene Inlandsch Reglement* pada Pasal 163, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* pada Pasal 283 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1635 menganut beban pembuktian biasa, dengan asas *actori incumbit probatio* yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Isu hukum yang dibahas adalah bagaimana pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam sistim hukum di Indonesia, bagaimana pembalikan beban pembuktian dalam penegakan hukum perlindungan konsumen yang berkeadilan, dan bagaimana prospektif pembalikan beban pembuktian dalam penyelesaian sengketa konsumen dikaitkan dengan pembaharuan hukum perlindungan konsumen. pendekatan masalah yang digunakan yuridis normatif. Untuk itu, data yang diperlukan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pengaturan pembalikan beban pembuktian terdapat dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dan penyelesaian sengketa konsumen. Pembalikan beban pembuktian dalam penegakan hukum yang berkeadilan adalah dengan menerapkan prinsip keadilan yang telah memenuhi sila-sila Pancasila dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian dengan pengecualian. Pembaharuan hukumnya, membedakan pembalikan beban pembuktian antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dan mengatur tentang alat bukti yang digunakan. Adapun saran dari disertasi ini adalah pembuktian diatur dalam satu bab khusus yang lebih tegas dan rinci dalam undang-undang perlindungan konsumen dan dilakukannya harmonisasi peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan perlindungan konsumen khusus hukum acara perdata yang baru dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru terkait dengan pembalikan beban pembuktian.

Kata Kunci : Pembaharuan hukum, Pembalikan beban pembuktian dengan pengecualian, Keadilan Pancasila

**LOAD REVERSE OF PROOF
IN CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT IN ORDER
CONSUMER PROTECTION LEGAL REFORM
(Misnar Syam, 1831203015, Doctor of Law Program, Faculty of Law, Andalas
University, Page 464, 2022)**

ABSTRACT

The burden of proof applied in the settlement of consumer disputes is the reversal of the burden of proof, according to Article 19 paragraph (5) and Article 28 Law No. 8/1999 on Consumer Protection. The purpose of the reversal of the burden of proof is to protect consumers. Therefore, consumers will get their rights back when business actors harm them. This reversal of the burden of proof is limited, where business actors only prove elements of guilt. On the other hand, business actors must still prove elements of unlawful acts and defaults. This process causes difficulties for consumers to prove the unlawful acts and defaults. Consequently, the goal of providing legal protection to consumers is not achieved. Consumer dispute settlement is included in civil disputes, procedural law used in court in accordance with the provisions of Article 163 of the *Herziene Inlandsch Reglement*, Article 283 of the *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, and Article 1635 of the *Civil Code*. This provision contains the ordinary burden of proof, with the principle of *incumbit probation* that causes the law to apply in its application. The legal issues discussed are how to regulate the reversal of the burden of proof in the legal system in Indonesia, how to reverse the burden of proof in fair consumer protection law enforcement, and how prospectively reversing the burden of proof in consumer dispute resolution is related to the renewal of consumer protection law. The problem approach used is normative juridical, meaning that the discussion of the research results focuses more on the provisions that provide relevant arrangements and theories for that. For this reason, the data needed are primary, secondary, and tertiary legal materials. The regulation of reversing the burden of proof is contained in criminal acts of corruption, money laundering, and consumer dispute resolution. Reversal of the burden of proof in fair law enforcement is to apply the principle of justice that has fulfilled the precepts of Pancasila by applying the reversal of the burden of proof with exceptions. The legal reform distinguishes the reversal of the burden of proof between acts against the law and default and regulates the evidence used. The suggestion from this dissertation is that the evidence is regulated in a special chapter that is more firm and detailed in the consumer protection law and the harmonization of laws and regulations related to consumer protection, specifically the new civil procedural law and the new consumer protection law related by reversing the burden of proof.

Keywords: Legal reform, Reversal of the burden of proof with exceptions, Justice of Pancasila

